

# ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAYA SERAP ANGGARAN PADA INSPEKTORAT DAERAH KOTA PAREPARE

*Analisis Of Factors Affecting Budget Absorption At The Inspectorate Parepare City Region*

Nursakina Yulfi<sup>1</sup>, Arham<sup>2</sup>, Ruslang T<sup>3</sup>

Email : [nursakinayulfi@gmail.com](mailto:nursakinayulfi@gmail.com)<sup>1</sup>, [arham83rocket@gmail.com](mailto:arham83rocket@gmail.com)<sup>2</sup>, [ruslangfeb@gmail.com](mailto:ruslangfeb@gmail.com)<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare

<sup>3</sup>Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare

Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan  
Kode Pos 91131

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi daya serap anggaran pada inspektorat daerah kota parepare, Faktor perencanaan yang merupakan salah satu fungsi dari anggaran sebagai alat perencanaan, selain itu dengan perencanaan yang matang pencapaian tujuan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Sedangkan dalam proses penganggaran tidak terlepas dari administrasi karena penganggaran merupakan bagian fungsi dari administrasi yang berkaitan dengan cara merencanakan keuangan, berapa anggaran yang diperlukan, darimana pembiayaannya, perhitungan uang masuk dan keluarnya, pengawasan yang dilakukan, tata usaha, pencatatan dan pembukuan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 2 orang yaitu kasubag program dan keuangan, dan Irban Inpestigasi Pada Inspektorat Daerah Kota Parepare. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Berdasarkan tingkat penyerapan Anggaran pada kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare pada tahun 2018 – 2022 adalah kategori Sangat Baik. Hasil penelitian faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran pada Kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare diantaranya adalah Perencanaan Anggaran Kas, faktor Pertanggungjawaban dan faktor Birokrasi, Tingkat Penyerapan Anggaran pada Kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare Tahun 2018 sebesar 92,89%, Tahun 2019 sebesar 94,22%, Tahun 2020 sebesar 91,01%, tahun 2021 sebesar 94,42% dan pada tahun 2022 sebesar 92,14%.

**Kata Kunci : Fungsi Anggaran, Daya Serap Anggaran**

## Abstract

*This research aims to determine the factors influencing budget absorption in the regional inspectorate of Parepare city. Planning factor is one of the functions of the budget as a planning tool; besides, with thorough planning, goal achievement can be effectively and efficiently accomplished. Meanwhile, in the budgeting process, administration cannot be separated, as budgeting is part of the administrative function related to financial planning, determining the required budget, financing sources, income and expenditure calculations, supervision, office procedures, record-keeping, and bookkeeping. The data collection techniques used in this study are observation, documentation, and interviews. The sample in this study consisted of 2 people: the head of the program and finance division, and the Investigation Subdivision Officer at the Regional Inspectorate of Parepare City. The data analysis technique in this study is descriptive research. Based on the level of budget absorption at the Regional Inspectorate Office of Parepare City from 2018 to 2022, it falls under the category of "Very Good". The research results indicate factors affecting the level of budget absorption at the Regional Inspectorate Office of Parepare City, including Cash Budget Planning, Accountability factors, and Bureaucracy factors. The Budget Absorption Rate at the Regional Inspectorate Office of Parepare City was 92.89% in 2018, 94.22% in 2019, 91.01% in 2020, 94.42% in 2021, and 92.14% in 2022.*

**Keywords : Budget Function, Budget Absorption Capacity**

## PENDAHULUAN

Pemerintahan bisa dibidang organisasi jika negara memberi wewenang untuk mengatur dan memenuhi segala keperluan dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat berdasarkan aturan perundang - udangan yang telah ditentukan supaya memberikan dampak yang lebih baik untuk masyarakat dari keadaan sebelumnya dan berdampak baik bagi suatu Negara tersebut. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dapat diartikan kegiatan yang meliputi perencanaan, kemudian bagaimana penganggarannya dilakukan, selanjutnya apakah pelaksanaannya berjalan dengan baik, kesesuaian pelaporannya, serta pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah .

Inspektorat Daerah merupakan suatu lembaga pengawasan dilingkungan pemerintah daerah yang memainkan peran yang sangat penting dan signifikan untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Peran dan fungsi Inspektorat Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam pasal tersebut melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintah Inspektorat Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: Pertama, perencanaan program pengawasan; Kedua, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan Ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Untuk menunjang agar pelaksanaan tugas dari Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara maksimal, diperlukan adanya pengawasan yang intensif dan optimal dari Inspektorat Daerah demi optimalisasi tugas serta tanggungjawab yang di embannya. Pengawasan dari Inspektorat Daerah sangat penting, oleh karena itu dengan adanya pengawasan maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat sehingga dapat diketahui seberapa jauh pula tugas yang telah diemban melalui tugas dan wewenang yang diberikan dapat dilaksanakan secara nyata dan maksimal.

Menurut Ramadhani dan Anisa (2017) penyerapan anggaran menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang merupakan akumulasi dari penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penyerapan anggaran yang rendah bukan merupakan satu-satunya indikator untuk menilai keberhasilan kinerja keuangan pemerintah daerah, namun pemerintah daerah tetap harus menaruh perhatian terhadap ini.

Anggaran merupakan sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu program. Tidak ada satu perusahaan pun yang memiliki anggaran yang tidak terbatas, sehingga proses penyusunan anggaran menjadi hal penting dalam sebuah proses perencanaan. Menurut Halim 2014, bahwa penyerapan anggaran adalah pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dipandang pada suatu saat tertentu (realisasi dari anggaran). Secara lebih mudah, masyarakat umum menyebutnya pencairan anggaran.

Anggaran merupakan salah satu alat yang digunakan sebagai perencanaan dan pengendalian semua kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam satuan kegiatan dan satuan uang, yang mencakup pengembangan dan aplikasi dari tujuan perusahaan, spesifikasi tujuan, pengembangan strategi jangka pendek dan jangka panjang, pembuatan suatu laporan kinerja periodik dan pengembangan prosedur tindak lanjut.

Anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan sebagai alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan untuk mengidentifikasi target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengidentifikasikan alokasi publik sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sumber pendanaan yang digunakan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja organisasi pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Faktor perencanaan yang merupakan salah satu fungsi dari anggaran sebagai alat perencanaan, selain itu dengan perencanaan yang matang pencapaian tujuan dapat dicapai

dengan efektif dan efisien. Sedangkan dalam proses penganggaran tidak terlepas dari administrasi karena penganggaran merupakan bagian fungsi dari administrasi yang berkaitan dengan cara merencanakan keuangan, berapa anggaran yang diperlukan, darimana pembiayaannya, perhitungan uang masuk dan keluarnya, pengawasan yang dilakukan, tata usaha, pencatatan dan pembukuan.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret suatu sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Menurut Bogdam dan Taylor yang dikutip oleh *Lexy.J. Moleong* pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada kantor inspektorat Kota Parepare Jl. Panorama, Ujung Bulu, Kec. Ujung, Kota Parepare Sulawesi selatan. Penelitian ini dalam jangka waktu 2 (dua) bulan di mulai pada bulan Februari - bulan April Tahun 2023. Informan adalah dimana data dapat di peroleh, sedangkan informan data dalam penelitian ini adalah subjek di mana data yang bersangkutan dengan penelitian itu di dapatkan. Informan adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya, membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah Bapak YAMIN S.T., (Kapala subbagian Program dan keuangan Inspektorat Daerah Kota parepare) dan Ibu SIMPUR SIANG S.T., M.Si (Irbn Infestigasi Inspektorat Daerah Kota Parepare).

### HASIL PENELITIAN

Keuangan daerah adalah semua hak serta keajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak serta kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD. Pelaksanaan otonomi daerah membawa perubahan pada pengelolaan. Keuangan daerah pada umumnya dan pengelolaan APBD pada khususnya yang sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah.

**Tabel 1. Realisasi Anggaran Kantor Inspektorat Kota Parepare Tahun 2018**

Uraian Program	Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(%)
Belanja tidak langsung	2.173.765.000	2.076.445.308	95,52
Program pelayanan administrasi perkantoran	535.422.500	505.621.314	94,43
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	247.200.000	219.313.170	88,72
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	55.000.000	48.301.064	87,82
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	30.000.000	29.999.200	99,997
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	596.260.000	556.770.000	93,38
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur dan pengawasan	310.000.000	257.993.547	83,22

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	332.158.000	295.569.861	88,98
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	125.000.000	101.454.850	81,16
<b>TOTAL</b>	<b>4.404.805.500</b>	<b>4.091.468.314</b>	<b>92,89</b>

Sumber: Laporan Fungsional Inspektorat Daerah Kota Parepare (2023)

Berdasarkan tabel 1 yang menyajikan data anggaran pada kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare Tahun 2018 maka dapat dijelaskan bahwa total Anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp.4,404,805,500 dengan realisasi sebesar Rp.4,091,468,314.

Terdapat (9) sembilan kegiatan yang dilakukan di kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare yaitu belanja tidak langsung pada kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare tahun 2018 sebesar Rp.2.173,765,000 dengan realisasi sebesar Rp.2,076,445,308. Kemudian program pelayanan administrasi perkantoran sebesar Rp.535,422,500 dengan realisasi sebesar Rp.505,621,314. Kemudian program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar Rp.247,200,000 dengan realisasi sebesar Rp.219,313,170.

Kemudian program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sebesar Rp.55,000,000 dengan realisasi sebesar Rp.48,301,064. Kemudian program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebesar Rp.30.000,000 dengan realisasi sebesar Rp.29,999,200. Kemudian program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh sebesar Rp.596,260,000 dengan realisasi sebesar Rp.556,770,000.

Kemudian program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur dan pengawasan sebesar Rp.310,000,000 dengan realisasi sebesar Rp.257,993,547. Kemudian program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan sebesar Rp.332,158,000 dengan realisasi sebesar Rp.295,569,861. Dan program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat sebesar Rp.125,000,000 dengan realisasi Rp.101,454,85.

**Tabel 2. Realisasi Anggaran Kantor Inspektorat Kota Parepare Tahun 2019**

Uraian Program	Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(%)
Belanja tidak langsung	2.393.111.000	2.451.082.832	102,42
Program pelayanan administrasi perkantoran	599.200.000	557.063.088	92,97
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	550.100.000	472.403.255	85,88
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	55.000.000	33.191.000	60,35
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	40.000.000	38.627.900	96,57
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	918.360.000	814.719.800	88,71

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur dan pengawasan	508.940.000	454.136.627	89,23
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	280.000.000	224.373.700	80,13
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	80.000.000	65.604.500	82,01
<b>TOTAL</b>	<b>5.424.711.000</b>	<b>5.111.202.702</b>	<b>94,22</b>

Sumber: Laporan Fungsional Inspektorat Daerah Kota Parepare (2023)

Berdasarkan tabel 2 yang menyajikan data anggaran pada kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare Tahun 2019 maka dapat dijelaskan bahwa total Anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp.5,424,711,000 dengan realisasi sebesar Rp.5,111,202,702.

Terdapat (9) sembilan kegiatan yang dilakukan di kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare yaitu belanja tidak langsung pada kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare tahun 2019 sebesar Rp.2,393,111,000 dengan realisasi sebesar Rp.2,451,082,832. Kemudian program pelayanan administrasi perkantoran sebesar Rp.599,200,000 dengan realisasi sebesar Rp.557,063,088. Kemudian program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar Rp.550,100,000 dengan realisasi sebesar Rp.472,403,255.

Kemudian program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sebesar Rp.55,000,000 dengan realisasi sebesar Rp.33,191,000. Kemudian program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebesar Rp.40,000,000 dengan realisasi sebesar Rp.38,627,900. Kemudian program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh sebesar Rp.918,360,000 dengan realisasi sebesar Rp.814,719,800.

Kemudian program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur dan pengawasan sebesar Rp.508,940,000 dengan realisasi sebesar Rp.454,136,627. Kemudian program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan sebesar Rp.280,000,000 dengan realisasi sebesar Rp.224,373,700. Dan program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat sebesar Rp.80,000,000 dengan realisasi Rp.65,604,500.

**Tabel 3. Realisasi Anggaran Kantor Inspektorat Kota Parepare Tahun 2020**

Uraian Program	Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(%)
Belanja tidak langsung	2.630.611.000	2.724.903.573	103,58
Program pelayanan administrasi perkantoran	446.524.000	425.053.920	95,19
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	489.336.000	415.751.056	84,96
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	24.000.000	20.987.500	87,45
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	38.000.000	32.918.300	86,63

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1.451.735.000	1.088.105.480	74,95
Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur dan pengawasan	299.445.000	231.023.500	77,15
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	331.203.000	258.976.450	78,19
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	-	-	-
<b>Total</b>	<b>5.710.854.000</b>	<b>5.197.719.779</b>	<b>91,01</b>

Sumber: Laporan Fungsional Inspektorat Daerah Kota Parepare (2023)

Berdasarkan tabel 3 yang menyajikan data anggaran pada kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare Tahun 2020 maka dapat dijelaskan bahwa total Anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp.5,710,854,000 dengan realisasi sebesar Rp.5,197,719,779.

Terdapat (9) sembilan kegiatan yang dilakukan di kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare yaitu belanja tidak langsung pada kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare tahun 2020 sebesar Rp.2,630,611,000 dengan realisasi sebesar Rp.2,724,903,573. Kemudian program pelayanan administrasi perkantoran sebesar Rp.446,524,000 dengan realisasi sebesar Rp.425,053,920. Kemudian program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar Rp.489,336,000 dengan realisasi sebesar Rp.415,751,056.

Kemudian program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sebesar Rp.24,000,000 dengan realisasi sebesar Rp.20,987,500. Kemudian program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebesar Rp.38,000,000 dengan realisasi sebesar Rp.32,918,300. Kemudian program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kdh sebesar Rp.1,451,735,000 dengan realisasi sebesar Rp.1,088,105,480.

Kemudian program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur dan pengawasan sebesar Rp.299,445,000 dengan realisasi sebesar Rp.231,023,500. Kemudian program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan sebesar Rp.331,203,000 dengan realisasi sebesar Rp.258,976,450. Dan program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat sebesar Rp.0.

**Tabel 4. Realisasi Anggaran Kantor Inspektorat Kota Parepare Tahun 2021**

Urain Program	Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(%)
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.912.850.150	3.754.887.853	95,96
Program penyelenggaraan pengawasan	1.427.944.400	1.318.645.121	92,35
Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	263.050.300	217.839.935	82,81
<b>TOTAL</b>	<b>5.603.844.850</b>	<b>5.291.372.909</b>	<b>94,42</b>

Sumber: Laporan Fungsional Inspektorat Daerah Kota Parepare (2023)

Berdasarkan tabel 4 yang menyajikan data anggaran pada kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare Tahun 2021 maka dapat dijelaskan bahwa total anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp.5,603,844,850 dengan realisasi sebesar Rp.5,291,369,909.

Terdapat (3) tiga program kegiatan yang dilakukan di kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare anggaran program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota pada kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare tahun 2021 sebesar Rp.3,912,850,150 dengan realisasi Rp.3,754,887,853. Kemudian program penyelenggaraan pengawasan sebesar Rp.1,427,944,400 dengan realisasi Rp.1,318,642,121. Dan program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi sebesar Rp.263,050,300 dengan realisasi sebesar Rp.217,839,935.

**Tabel 5. Realisasi Anggaran Kantor Inspektorat Kota Parepare Tahun 2022**

Uraian Program	Anggaran	Realisasi	
		(Rp)	(%)
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	6.169.274.030	5.675.037.925	91,99
Program penyelenggaraan pengawasan	375.980.250	354.115.886	94,18
Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	350.775.650	325.025.449	92,66
<b>Total</b>	<b>6.896.029.930</b>	<b>6.354.179.260</b>	<b>92,14</b>

Sumber: Laporan Fungsional Inspektorat Daerah Kota Parepare (2023)

Berdasarkan tabel 5 yang menyajikan data anggaran pada kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare Tahun 2022 maka dapat dijelaskan bahwa tahun 2022 sebesar Rp.6,896,029,930 dengan realisasi sebesar Rp.6,354,179,260.

Terdapat (3) tiga kegiatan yang dilakukan di kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota pada kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare tahun 2022 sebesar Rp.6,169,274,030 dengan realisasi Rp.5,675,037,925. Kemudian program penyelenggaraan pengawasan sebesar Rp.375,980,250 dengan realisasi sebesar Rp.354,115,886. Dan program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi sebesar Rp.350,775,650 dengan realisasi sebesar Rp.325,025,449.

Tingkat penyerapan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota pada kantor inspektorat kota parepare tahun 2022 sebesar 91,99% kemudian Program penyelenggaraan pengawasan tingkat penyerapannya sebesar 94,18% sedangkan Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi sebesar 92,66% sehingga total jumlah penyerapan anggaran pada kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare sebesar 92,14

## PEMBAHASAN

Pembahasan pada hasil penelitian yang dilakukan pada kantor Inspektorat Kota Parepare periode tahun 2018-2022. Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis data penelitian menggunakan rumus untuk menghitung persentase penyerapan anggaran sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Penyerapan Anggaran 2018} &= \frac{4.091.468.314}{4.404.805.500} \times 100\% \\ &= 92,89\% \\ \text{Penyerapan Anggaran 2019} &= \frac{5.111.202.702}{5.424.711.000} \times 100\% \\ &= 94,22\% \\ \text{Penyerapan Anggaran 2020} &= \frac{5.197.719.779}{5.710.854.000} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 91,01\% \\ \text{Penyerapan Anggaran 2021} &= \frac{5.291.369.909}{5.603.844.850} \times 100\% \\ &= 94,42\% \\ \text{Penyerapan anggaran 2022} &= \frac{6.354.179.260}{6.896.029.930} \times 100\% \\ &= 92,14\% \end{aligned}$$

Berdasarkan analisis presentase penyerapan anggaran pada kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare maka dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2018 jumlah realisasi sebesar Rp.4,091,468,314 dengan jumlah anggaran perubahan sebesar Rp.4,404,805,500 sehingga diperoleh hasil perhitungan tahun 2018 tingkat penyerapan anggaran pada kantor inspektorat daerah kota parepare sebesar 92,89%.

Pada tahun 2019 jumlah realisasi pada kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare sebesar Rp.5,111,202,702 dengan jumlah anggaran perubahan sebesar Rp.5,242,711,000 sehingga diperoleh hasil perhitungan tahun 2019 tingkat penyerapan anggaran pada kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare sebesar 94,22%.

Pada tahun 2020 jumlah realisasi pada kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare sebesar Rp.5,197,719,779 dengan jumlah anggaran perubahan sebesar Rp.5,710,324,000 sehingga diperoleh hasil perhitungan tahun 2020 tingkat penyerapan anggaran pada kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare sebesar 91,01%. Pada tahun 2022 tingkat penyerapan anggaran sebesar 91,01% karena adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan yang tidak maksimal dilaksanakan sehingga serapan anggaran menurun.

Pada tahun 2021 jumlah realisasi pada kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare sebesar Rp.5,291,369,909 dengan jumlah anggaran perubahan sebesar Rp.5,603,844,850 sehingga diperoleh hasil perhitungan tahun 2021 tingkat penyerapan anggaran pada kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare sebesar 94,42%.

Pada tahun 2022 jumlah realisasi pada kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare sebesar Rp.6,354,179,260 dengan jumlah anggaran perubahan sebesar Rp.6,896,029,930 sehingga diperoleh hasil perhitungan tahun 2022 tingkat penyerapan anggaran pada kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare sebesar 92,14%.

Anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan sebagai alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan untuk mengidentifikasi target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengidentifikasikan alokasi publik sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sumber pendanaan yang digunakan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja organisasi pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Tingkat penyerapan anggaran akan mencerminkan sejauh mana program-program pemerintah mampu dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Tingginya tingkat penyerapan anggaran menunjukkan dana APBD telah direalisasikan untuk kepentingan rakyat melalui proram-program pemerintah, sebaliknya jika tingkat penyerapan anggaran rendah maka hal tersebut menunjukkan bahwa dana APBD belum maksimal dinikmati oleh masyarakat disebabkan masih banyaknya program pemerintah yang belum terealisasi.



**Gambar 1. Diagram Batang Penyerapan anggaran**

Pada tahun 2018 ke 2019 penyerapan anggaran meningkat ini dikarenakan penambahan jumlah pegawai fungsional serta penambahan pegawai pada Inspektorat Kota Parepare pada tahun 2019 dan meningkatnya belanja perjalanan dinas yang cukup signifikan.

Pada tahun 2019 ke 2020 terjadi penurunan serapan anggaran hal ini disebabkan adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan beberapa program tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Hal ini antara lain disebabkan oleh menurunnya belanja perjalanan dinas dan belanja sewa / ruang / gedung yang cukup signifikan akibat wabah pandemi covid-19.

Pada tahun 2020 ke 2021 penyerapan anggaran meningkat ini disebabkan antara lain adanya penambahan kegiatan serta meningkatnya anggaran pengawasan pada Inspektorat Kota Parepare. Pada tahun 2021 ke 2022 penyerapan anggaran menurun hal ini disebabkan antara lain adanya peralihan antara belanja jasa berupa honorarium yang dialihkan menjadi belanja pegawai (belanja tambahan penghasilan ASN).

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka peneliti dapat membuat simpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Beberapa faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran pada Kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare diantaranya adalah Perencanaan Anggaran Kas, faktor Pertanggungjawaban dan faktor Birokrasi.
2. Tingkat Penyerapan Anggaran pada Kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare Tahun 2018 sebesar 92,89%, Tahun 2019 sebesar 94,22%, Tahun 2020 sebesar 91,01%, tahun 2021 sebesar 94,42% dan pada tahun 2022 sebesar 92,14%.
3. Berdasarkan tingkat penyerapan Anggaran pada kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare pada tahun 2018 – 2022 adalah kategori Sangat Baik.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka berikut peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Peneliti berharap Inspektorat Daerah Kota Parepare dapat terus meningkatkan penyerapan anggaran sehingga dapat beradap pada kategori Sangat baik.
2. Peneliti berharap agar Inspektorat Daerah Kota Parepare mampu mengantisipasi faktor – faktor penghambat dalam proses penyerapan anggaran.
3. Peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian lebih detail tentang penyerapan anggaran pada kantor Inspektorat Daerah Kota Parepare Kota Parepare.

## DAFTAR PUSTAKA



- Adelia, T. D., Firmansyah, F., & Nurhasanah, N. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. *JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA (JSM) e-ISSN 2745-5955| p-ISSN 2809-0543*, 3(7), 1100-1115.
- Ani, L., Mulyadi, J. M. V., & Pratowo, D. (2020). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA DENGAN PERENCANAAN ANGGARAN SEBAGAI PEMODERASI PADA PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN 2013-2017. *EKOBISMAN-JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN*, 5(1), 1-16.
- Ariyani, R., & Sunarya, H. (2022). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN DI KANTOR DAERAH BADAN PERTANIAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. *Jurnal Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang*, 9(1), 39-47.
- DUMA, J. (2020). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249 Tahun 2011 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan rencana Kerja dan Anggaran.  
Sugiyono. 2011. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D", AFABETA. Bandung.
- <http://repository.stie-mce.ac.id/1201/3/3.%20Bab%20II%20Tinjauan%20Pustaka.pdf>
- <https://accurate.id/marketing-manajemen/pengertian-perencanaan/>
- Kartika Chandra Dewi, K. (2021). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman* (Doctoral dissertation, Universitas Teknologi Yogyakarta).
- Kuswoyo, I. D. (2012). *Analisis atas Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terkonsentrasinya Penyerapan Anggaran Belanja di Akhir Tahun Anggaran (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah KPPN Kediri)*
- LESMANA, A. (2018). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran belanja Pemerintah Daerah (Studi Komparatif antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang)* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Ndaparoka, M. A. E. D. S., & Tomasowa, T. E. D. (2019). Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Kupang. *Jaka-Jurnal Jurusan Akuntansi*, 3(2), 46-56.
- Rahmawati, R. S., & Ishak, J. F. (2020). Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Cimahi. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 180-189.
- Safpremi, Y., Putri, A. M., & Ahyaruddin, M. (2022). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 7(2), 188-199.
- Santoso, B. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Administrasi Sebagai Pemoderasi Viki Ulandari1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Indonesia.

- Tanjung, F. S., Budianto, A., & Lubis, P. A. (2022). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN PADA PEMERINTAH DAERAH TANJUNG JABUNG BARAT DENGAN ADMINISTARASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *JURNAL MANEKSI*, 11(2).
- Mataram, U. (n.d.). *Factors Affecting Budget Absorption in Regional Work Units With Administration as Moderators*. 1577–1591. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i06.p18>
- Nurmiati. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran. *Kinerja: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 13(2), 1–17. <http://journal.feb.unmul.ac.id>
- Rahmawati, R., & Jouzar Farouq Ishak. (2020). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Cimahi. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 180–189.